



**Ariel Heryanto**  
Dosen Universitas Kristen  
Satya Wacana

HARI Pers Nasional tahun ini terasa penuh warna. Wajar saja karena masyarakat, juga insan pers, masih merasakan akibat pencabutan SIUPP yang dialami *Detik*, *Tempo*, dan *Editor* meski dua penggantinya telah muncul.

Kejadian itu, dari satu sisi, tentu saja amat menyakkan. Dan, bukan mustahil, awak pers akan mengerut. Tapi, di sisi lain, kejadian itu pun memunculkan pemikiran dan pemahaman ulang ihwal pers yang selaras dengan kondisi bangsa ini.

Bila pemahaman itu tak diwujudkan, boleh jadi pencabutan demi pencabutan SIUPP akan terus berlangsung. Itu tampak dari sedikitnya 30 penerbitan media massa yang telah dicabut izinya selama zaman pembangunan ini. Sekali lagi, kejadian itu hanya bisa dicegah dengan adanya kesesuaian paham antara para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, insan pers pun dituntut tak sekadar menjadi agen pembangunan, tapi juga harus mampu menjadi bagian dari sebuah mesin industri. Tuntutan kenaikan tiras dan iklan makin terasa. Bahkan, tak jarang itu harus berseberangan dengan tuntutan berita. Dalam hal ini, mana yang harus dikalahkan?

Perlombaan mencapai tiras sebesar-besarnya dan memperebutkan porsi iklan yang kian menciut telah menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kerja penerbitan. Sampai-sampai hal ini menyingkirkan hal-hal yang justru dimuliakan dalam perkuliahan ilmu

komunikasi dan diagung-agungkan jurnalis profesional -- kalau bukan jurnalis aktivis.

Selain itu, semakin hari kian jelas modal dan teknologi maupun khalayak memanjakan media elektronik. Yang disebut belakangan ini ibarat "adik baru" yang baru lahir atau sedang lucu-lucunya bertumbuh. Media elektronik telah menjadi pusat perhatian dan kasih sayang seluruh keluarga. Dan masih akan lebih lucu dan memesonakan semua pihak dalam tahun-tahun mendatang.

Akibatnya, bukan sekadar media cetak kalah perhatian atau gengsi, tapi



juga kehilangan porsi iklan yang menjadi pertimbangan utama para pengelola dan pemilik usaha media cetak. Hari Pers Nasional mungkin akan segera diganti dengan perayaan Hari Media Elektronik Nasional, atau nama lain yang lebih afdol.

Tentu saja itu bukan keseluruhan kisah tentang media massa dan pers. Kita perlu sedikit menengok sejarah. Ada sejarah yang mendahuluinya. Ada pula yang akan menyusul kisah di atas.

Bila ditengok sedikit ke belakang, apa yang dialami pers kita masa kini merupakan sebuah kenyataan yang

harus dihadapi. Tuntutan idealisme para insan pers harus mampu bertautan dengan keinginan pemilik modal. Selain itu, mereka pun harus mampu memahami nilai-nilai yang berlaku, baik dalam masyarakat maupun pemerintahan. Dengan demikian, "ayah bunda" pers saat ini bukan hanya negara, tapi juga pemilik modal. Sebab, lewat keduanya itulah, pers bisa lahir dan berkembang. Dan, walaupun mati, itu hanya karena dua hal: tak bisa bersaing di pasar atau tak bisa menyesuaikan persepsinya dengan pemerintah.

Sejarah tak berhenti di situ. Media elektronik yang kini dianak-emaskan modal dan teknologi, pada tahap berikutnya, pun akan mengalami hal serupa. Ia harus mampu mempertautkan persepsinya dengan "ayah kandung"-nya, yakni pemerintah dan pemilik modal.

Itu wajar karena media elektronik tak lagi mengenal batas wilayah. Informasi elektronik bisa datang dari siapa saja. Modal tercerai-berai dalam kecepatan yang luar biasa. Iklan bukan lagi komunikasi bagi produk si pemodal, melainkan hiburan dan kebudayaan pop.

Bagi kaum yang pesimistis, tentu saja kondisi demikian merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan pers nasional. Jelasnya, jati diri pers telah berubah wujud: dari agen pembangunan menjadi pelaku bisnis semata.

Apakah ini kemunduran? Tak jelas. Yang pasti, pergeseran dunia pers menjadi sebuah industri tak pernah bisa dielakkan oleh negara maju sekalipun. Agaknya, yang paling penting adalah mewujudkan kompromi antara kepentingan bisnis, alias pemilik modal, dan tuntutan masyarakat ihwal berita. Dan, bila formula itu sudah ditemukan, agaknya, pers itu agen bisnis atau pembangunan, tak perlu lagi diperdebatkan. ■